

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN
(STUDI EMPIRIS PADA INSPEKTORAT KOTA SE PROVINSI
SUMATERA BARAT)**

ARTIKEL



OLEH:

DOLLY RAMON

57709/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2014

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN

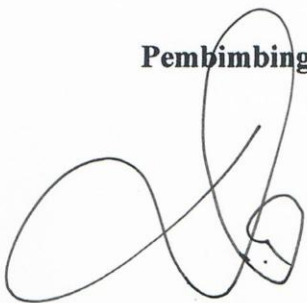
(Studi Empiris Pada Inspektorat Kota se Provinsi Sumatera Barat)

Oleh :
DOLLY RAMON
57709/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Juni 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, April 2014

Pembimbing I



Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

Pembimbing II



Mayar Afriventi, SE, M.Sc
NIP.19840113 200912 2 005

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN

(Studi Empiris pada Inspektorat Kota se Provinsi Sumatera Barat)

DOLLY RAMON

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar

email: dolly_ramon@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Inspektorat Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah staf/ karyawan bagian pengawasan maka didapat responden sebanyak 64 orang responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dengan bantuan *SPSS 15*.

Kesimpulan penelitian menunjukkan: pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,618 > 1,670$. Nilai koefisien dari sistem pengendalian intern (X) adalah 0,789 ini berarti bahwa meningkatnya sistem pengendalian intern satu satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan 0,789 satuan dan bentuk pengaruh X.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of internal control system on the use of financial accountability . This study is classified as a type of research that is causative .

The population in this study is the Regional Working Units (on education) Padang . The sample in this study is the staff / employees the importance of the financial section of respondents were 64 respondents . Data were collected by distributing questionnaires to the respondents directly concerned . Technical analysis of the data used is multiple regression with SPSS 15 .

Conclusion The study shows : the effect of internal control system to use financial accountability with $t > t$ table is $9.618 > 1.670$. Coefficient of the variable internal control system (X) is 0.789 means that increasing one unit of internal control system , it will increase the utilization of the financial accountability and 0.789 units of X influences shape .

Keywords : Internal Control System

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Masalahnya adalah apakah akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu akuntabilitas keuangan yang berkualitas. Akuntabilitas keuangan yang berkualitas memuat informasi yang akurat/handal dan valid yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah yang bersangkutan (Mohamad, 2004:278).

Untuk menghasilkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas perlu didukung dengan unsur pengawasan, hal ini diperlukan agar akuntabilitas keuangan berisi informasi yang tidak mengandung kesalahan yang material dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan (PP No 20 Tahun 2001).

Halim (2004:258) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. *Public Accountability* hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang profesional, independen dan obyektif (Halim, 2002:28).

Jadi dengan adanya pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengawasan intern

oleh inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas

Selain melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.60 Tahun 2008, Inspektorat juga berperan dalam meningkatkan dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern yaitu dengan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern yang baik, pertanggungjawaban dapat terwujud. Salah satu indikator dari sistem pengendalian intern adalah adanya pemeriksaan yang independen terhadap pelaksanaan. Jika pemeriksaan ini dilaksanakan secara baik maka akan timbul kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang merupakan indikator dari akuntabilitas publik.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Undang-undang dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih *akuntabel* dan transparan. Hal ini akan tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Untuk itu dibutuhkan sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi akuntansi yang handal, dan mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Surya (2004) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan antara pengendalian intern terhadap penerapan akuntabilitas.

Dengan masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas tentunya dapat membuka lebar peluang terjadinya manipulasi data yang berujung pada kecurangan. Salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan yang merupakan unsur utama perbuatan korupsi ini adalah dengan meningkatkan dan membangun pengendalian intern yang baik dan menyeluruh.

Pengendalian intern merupakan upaya yang dilakukan mencakup unsur-unsur pengendalian intern: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dipercayanya informasi dan data, serta ditaatinya peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan pengendalian intern secara baik dan efektif pada suatu pemerintahan, maka akan meningkatkan kualitas akuntabilitas publik dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 58 dengan sangat tepat mengamanatkan kepada Presiden RI selaku Kepala Pemerintah, agar mengatur dan menyelenggarakan pengendalian intern dilingkungan pemerintahan secara menyeluruh, untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/negara.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan, penelitian ini mengganti variabel *good corporate governance* dengan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan paparan diatas, penulis merasa tertarik membuat penelitian untuk melihat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Maka penulis, akan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Sejauhmana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di sektor publik.
2. Bagi akademik, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa dilingkungan akademika.
3. Bagi sektor publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan akuntabilitas terhadap informasi laporan keuangan.

II. LANDASAN TEORI

A. Sistem Pengendalian Intern

1). Pengertian

Pengendalian Intern menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesi Akuntan Publik pada Sistem Akuntansi tentang Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan paragraph 06 adalah:

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Untuk menunjang dan meperkuat efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang berperan sebagai APIP adalah BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota (PP No. 60 Tahun 2008).

2). Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Aren (2004:397) sasaran hasil yang luas, dalam merancang suatu sistem kendali yang efektif:

1) Keandalan Pelaporan Keuangan

Menekankan pada tujuan dasar dalam setiap organisasi, mencakup kinerja, profitabilitas dan pengamanan sumber daya.

2) Efisiensi dan Efektifitas Operasional

Memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Menyangkut kehandalan laporan organisasi

3) Pemenuhan Ketentuan Hukum dan Regulasi yang bisa ditetapkan

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dimana organisasi itu berada.

SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1) Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

2) Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

3). Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, unsur-unsur SPI dalam Pemerintah mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintahan di berbagai Negara yang meliputi:

a). Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian Intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan Pengendalian mencakup:

1). Penegakan *integritas* dan nilai etika

Integritas dan nilai-nilai adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktik.

2). Komitmen terhadap kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan

manajemen terhadap kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut dapat berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diinginkan

3). Kepemimpinan yang *kondusif*

Manajemen, melalui aktivitasnya, memberikan isyarat yang jelas kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian internal. Dengan memahami aspek-aspek yang ada dalam *filosofi* dan gaya kepemimpinan manajemen akan membuat auditor merasakan sikap manajemen tentang pengendalian intern

4). Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Struktur organisasi suatu membatasi garis tanggungjawab dan wewenang yang ada. Ini juga biasanya menghubungkan garis arus komunikasi.

5). Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Metode komunikasi formal mengenai wewenang dan tanggungjawab dan masalah sejenis yang berkaitan pengendalian juga sama pentingnya.

6). Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia

Aspek penting dalam setiap sistem pengendalian adalah pegawai. Jika pegawainya kompeten dan dapat dipercaya, pengendalian lain boleh tidak ada dan laporan keuangan yang andal tetap bisa dihasilkan.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003).

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004).

Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dalam menjalankan program dan kegiatan untuk melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Dimensi Akuntabilitas

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban *horizontal* bukan hanya pertanggungjawaban *vertikal*. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Adapun dimensi

akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan biaya murah.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPD dan masyarakat luas.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik, untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat.

3. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN dalam Akuntabilitas dan *Good Governance* (2001) dalam pelaksanaan Akuntabilitas dilingkungan

Instansi Pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar *akuntabel*.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh .
- e. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai *katalisator* perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

4. Kendala Akuntabilitas

Menurut Mahsun (2006), dalam mengimplementasikan akuntabilitas pada umumnya menemui kendala yang justru biasa menjadi perbedaan demi menciptakan kesehatan dan hubungan akuntabilitas yang efektif . Beberapa hal yang menjadi kendala akuntabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Agenda atau rencana

Agenda atau rencana yang disusun secara tidak transparan akan mengarahkan organisasi dalam suatu kondisi yang hanya menguntungkan perseorangan. Jadi, akuntabilitas mensyaratkan transparansi yang berarti keterbukaan.

b) *Favoritism*

Favoritism merupakan isu yang licik. Manajemen dapat saja melakukan kinerja secara lebih unggul dan meninggalkan karyawan yang mengarah pada kinerja yang kurang baik, juga membebani karyawan secara berlebih.

c) Kepemimpinan yang lemah

Komitmen kepemimpinan untuk membangun suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas merupakan hal yang krusial.

Tanpa kepemimpinan yang kuat, hasil kinerja akan kurang dari yang diharapkan.

d) Kekurangan sumber daya

Hal ini akan menjadi kurang berguna jika individu atau tim tidak didukung sumber daya untuk melaksanakan pekerjaannya.

e) *Lack of follow-through*

Ketika manajemen mengatakan bahwa mereka akan mengerjakan sesuatu dan mereka tidak akan mengerjakan sesuatu, hal ini berarti manajemen mengatakan bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk menindaklanjuti.

f) Garis kewenangan dan tanggungjawab kurang jelas

Jika garis wewenang dan tanggungjawab anggota organisasi ditetapkan dengan tidak jelas maka akan sulit untuk menentukan letak akuntabilitasnya.

g) Kesalahan penggunaan data

Informasi kinerja harus lengkap dan memiliki *kredibilitas* serta harus dilaporkan secara tepat waktu. Dengan menggunakan data yang relevan maka akan menunjukkan kelemahan transparansi dan ketidakpercayaan.

5. Dimensi pengukuran akuntabilitas keuangan:

a. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

- 1). Pengungkapan sebab adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi
- 2). Pengungkapan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- 3). Pengungkapan sebab-sebab adanya perbedaan realisasi anggaran tahun sekarang dengan realisasi anggaran tahun lalu
- 4). Penyampaian akuntabilitas kinerja keuangan tepat waktu

b. Penilaian kinerja keuangan

- 1) Penilaian kinerja keuangan dari aspek kehematan penggunaan sumber dana
- 2) Penilaian kinerja keuangan dari aspek efisiensi penggunaan sumber dana
- 3) Penilaian kinerja keuangan dari aspek efektivitas penggunaan sumber dana

- 4) Penilaian atas pencapaian tujuan yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut dari tahun ke tahun

c. Sistem informasi yang handal

- 1) Data keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan material
- 2) Data keuangan yang disajikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 3) Dalam penyajian data keuangan terdapat netralitas dalam pengungkapan

d. Akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen

- 1) Adanya penilaian yang objektif dan independen terhadap akuntabilitas kinerja keuangan
- 2) Tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas

C. Hubungan antar Variabel dan Hipotesis

Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Akuntabilitas Keuangan

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atas keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Halim (2004:258) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan *public accountability* hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang profesional independen dan objektif (Halim, 2002:28).

Surya (2004) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan antara pengendalian intern terhadap penerapan akuntabilitas. Widiyanto (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintahan Kota Bandung. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Satria (2010) melakukan penelitian tentang peran inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik. Hasilnya menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa apabila system pengendalian intern yang berjalan dengan sangat baik akan mendorong meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

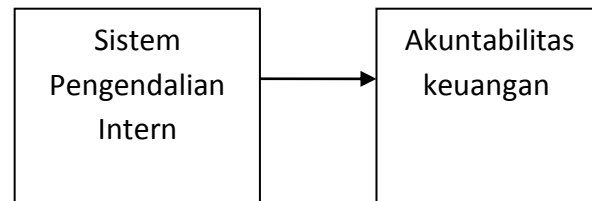
Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD, melalui satu media pertanggungjawaban dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas keuangan negara pada pemerintah daerah akan berhasil bila tujuan dari sistem pengendalian intern pemerintah di pemerintah daerah tercapai yaitu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan.

Dengan terbangunnya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah yang kuat dan memadai, maka *good governance* (tata kelola) pemerintah daerah yang baik dan *good governance* serta akuntabilitas keuangan daerah tercapai, yang ditandai tercapainya visi dan misi serta tujuan pemerintah daerah, keandalan laporan keuangan dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, serta semakin menurunnya dan kecilnya peluang korupsi dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang serta KKN dalam penyelenggaraan kegiatan

pembangunan dan pelayanan publik di pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori diatas, maka rumusan hipotesis penelitian ini, yaitu antara lain:

H1 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas keuangan

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian *kausatif*. Penelitian *kausatif* berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Sekaran, 2006). Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan pengaruh sistem pengendalian intern sebagai variabel *independen* dengan akuntabilitas keuangan sebagai variabel *dependen*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *survey*. Sedangkan periode waktu yang digunakan adalah *cross sectional* yaitu fakta sesaat berupa data yang hanya dapat digunakan sekali dalam suatu periode pengamatan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemda kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 7 kota. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah (Pemda) di kota wilayah Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan unit observasi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Inspektorat kota di wilayah propinsi Sumatera Barat.

Alasan ditetapkannya Inspektorat sebagai unit observasi adalah berkaitan dengan variabel yang diteliti. Permendagri No. 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sealain itu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Inspektorat Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada walikota. Nama dan alamat kantor Inspektorat Kota di Sumatera Barat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1
Populasi Penelitian

No	Kota	Alamat
1	Inspektorat Kota Padang	Jl. Batang Tarusan 3 Padang
2	Inspektorat Kota Bukittinggi	Jl. By Pass KM 1 Gulai Bancah Bukittinggi
3	Inspektorat Kota Sawahlunto	Jl. Soekarno Hatta Durian II Sawahlunto
4	Inspektorat Kota Solok	Jl. Cindur Mato No. 30 Solok
5	Inspektorat Kota Pariaman	Jl. Rohana Kudus 44 Pariaman
6	Inspektorat Kota Padang Panjang	Jl. St. Syahrir no 237Silaing Bawah Padang Panjang
7	Inspektorat Kota Payakumbuh	Jl. Rasuna Said Payakumbuh

Sumber: Badan Kepegawaian Kota Padang, 2013

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah data *primer*. Data *primer* adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung berdasarkan kuesioner.

D. Variabel penelitian

Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan.

2. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel dependen nantinya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian inter .

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun sendiri. Variabel-variabel yang diukur dalam kuesioner ini mencakup: 1). Sistem Pengendalian Intern, dan 2) Akuntabilitas Keuangan.

Untuk pernyataan Sistem Pengendalian Intern alternatif jawabannya adalah SS = Sangat Setuju, S = Setuju, RR = Ragu-Ragu, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju. Sedangkan untuk pertanyaan Akuntabilitas Keuangan jawabannya adalah: 5 (S = Selalu), 4 (SR = Sering), 3 (P = Pernah), 2 (K = Kadang-kadang), 1 (TP = Tidak Pernah).

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dipahami konsep operasional dan indikator variabel penelitiannya dapat dilihat pada tabel 2 di lampiran.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur sebelum *kuesioner* dibagikan kepada responden, terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan terhadap *kuesioner* untuk uji *validitas* menggunakan rumus *korelasi product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum Y)(\sum X)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

(Arikunto, 2002)

keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi

n = besar sampel

x = variabel bebas (x)

y = variabel terikat akuntabilitas keuangan

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian *validitas*, selanjutnya akan dilakukan pengujian *reliabilitas* yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan *reliabel* (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas digunakan rumus *Cronbach's Alpha*

$$r = \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

(Sekaran, 2006)

G. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan modal serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model *regresi* sederhana, karena model *regresi* yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model *regresi* agar parameter estimasi tidak bias, yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode kolmogorov smirnov dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka akan berdistribusi normal.

2. Uji Heterokedostisitas

Uji *heterokedostisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke residual suatu pengamatan yang lain.

H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan menggambarkan masing-masing variabel dalam bentuk hasil distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisis *mean*, standar deviasi, tingkat capaian responden dan koefisien serta memberikan *interpretasi* analisis tersebut.

2. Metode Analisis Data

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup didalam perhitungan *adjusted R²* untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel x yang ada dalam model.

3. Uji hipotesis

Uji t (t-test)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Jika t hitung > t tabel, atau $@ < 0,05$, maka H_a diterima. Jika t hitung < t tabel atau $@ > 0,05$, maka H_a ditolak. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian adalah 95% atau ($@$) = 0,05.

4. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini. Maka perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1) Sistem pengendalian intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2) Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan yang berkualitas memuat informasi yang akurat/handal dan *valid* yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah yang bersangkutan.

IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Inspektorat Kota di Sumatera Barat, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai di bagian keuangan di kantor Inspektorat Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 64 orang, dimana di kota Padang sebanyak 11 orang pegawai, kota Bukittinggi sebanyak 10 orang pegawai, kota Padang Panjang 10 orang pegawai, kota Payakumbuh sebanyak 10 orang pegawai, kota Sawahlunto sebanyak 10 orang pegawai, dan kota Solok sebanyak 13 orang. Unit analisis di populasi tersebut adalah pegawai bagian akuntansi sebagai sumber informasi mengenai system pengendalian

intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara diantar langsung kepada masing-masing responden. Rentang waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner adalah dari bulan September sampai bulan Desember 2013. Gambaran penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah Populasi	250
Jumlah Sampel	69
Jumlah kuesioner yang disebar	69
Jumlah kuesioner yang kembali	64
Jumlah kuesioner yang dapat digunakan	64
Respon Rate	92,75%

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa dari seluruh Inspektorat, dimana sampelnya adalah sebanyak 69 orang. Di 69 kuesioner yang disebar, diantaranya yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dengan lengkap adalah sebanyak 64 kuesioner dengan tingkat pengembalian 92,75%, sedangkan yang dapat diolah atau dipergunakan adalah sebanyak 64, semua kuesioner yang dikembalikan dapat diolah.

B. Analisis Deskriptif

Berdasarkan data yang diisi oleh responden yang terdapat pada kuesioner penelitian dapat diketahui karakteristik responden pegawai Inspektorat Kota di Sumatera Barat yang mengisi kuesioner penelitian. Adapun karakteristik responden yang disajikan yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja yang disajikan dalam tabel-tabel berikut ini:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Proporsi Karyawan yang menjadi responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	23	35,9 %
2	Wanita	41	64,1 %
Jumlah		64	100 %

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa yang menjawab kuesioner lebih banyak wanita yaitu sebanyak 41 responden (64,1%) dan pria hanya sebanyak 23 responden (35,9%). Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin dapat mempengaruhi partisipasi dalam pengisian angket, kecenderungan disini wanita memiliki partisipasi yang lebih tinggi daripada pria dalam pengisian angket.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Proporsi Karyawan yang menjadi responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Responden Berdasarkan Usia

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Usia 20-30	13	20,3%
2	Usia 31-40	24	37,5%
3	Usia > 40	27	42,2%
Jumlah		64	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa 13 responden (20,3%) berusia 20-30 tahun, 24 responden(37,5%) berusia 31-40 tahun, 27 responden (42,2%) berusia >40 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang berusia >40 tahun memiliki partisipasi yang tinggi dalam pengisian angket dibandingkan dengan usia

yang lainnya yaitu sebanyak 27 orang atau 42,2%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Proporsi Karyawan yang menjadi responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Responden berdasarkan pendidikan terakhir

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	D 3	10	15,6%
2	S 1	43	67,2%
3	S 2	11	17,2%
4	S 3	-	-
5	Lainnya	-	-
Jumlah		64	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa 10 responden (15,6%) berpendidikan D3, 43 responden (67,2%) berpendidikan S1, 11 orang responden (17,2%) berpendidikan S2. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden yang berpendidikan S1 partisipasinya sangat tinggi dalam pengisian angket dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam hal ini juga dapat dinyatakan bahwa pada umumnya karyawan bagian akuntansi di Inspektorat Kota di Sumatera Barat berpendidikan S1 yang mencapai 43 orang atau sebesar 67,2%.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Proporsi Karyawan yang menjadi responden berdasarkan lama bekerja adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	1-2 tahun	10	15,6 %
2	3-4 tahun	14	21,9%
3	5-6 tahun	11	17,2%
4	.> 6 tahun	29	45,3%
Jumlah		64	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa responden yang lama kerjanya 1-2 tahun adalah sebanyak 10 responden (15,6%), yang lama kerjanya 3-4 tahun adalah sebanyak 14 responden (21,9%), yang lama kerjanya 5-6 tahun adalah sebanyak 11 responden (17,2%) dan yang lama kerjanya >6 tahun adalah sebanyak 29 responden (45,3%). Jadi dapat disimpulkan bahwa responden yang lama kerjanya >6 tahun, partisipasinya sangat tinggi dalam pengisian angket dibandingkan dengan yang lainnya.

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan deskripsi dari hasil penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan. Untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersebut dapat dikategorikan dalam:

1. Sistem Pengendalian Intern

Distribusi frekuensi skor Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 2 indikator yaitu kegiatan pengendalian sistem akuntansi pendapatan dan kegiatan pengendalian sistem akuntansi belanja/biaya. Dua indikator tersebut terdiri atas 12 item pernyataan pada kuesioner. Dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini (lampiran):

2. Akuntabilitas Keuangan

Distribusi frekuensi skor Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 2 indikator yaitu kegiatan pengendalian sistem akuntansi pendapatan dan kegiatan pengendalian sistem akuntansi belanja/biaya. Dua indikator tersebut terdiri atas 12 item pernyataan pada kuesioner. Dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini (lampiran):

D. Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah sistem pengendalian intern. sedangkan variabel dependen adalah

akuntabilitas keuangan. Berikut ini tabel 10 data statistic deskriptif masing-masing variabel (tabel 10):

Tabel 10
Descriptive Statistic

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
SPI	64	36	60	52,31	5,566
AK	64	41	60	52,08	5,677
Valid N	64				

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 10 diatas dari 64 responden yang diteliti terlihat berdasarkan bahwa variabel sistem pengendalian intern (x) memiliki nilai rata-rata 52,31 dengan standar deviasi 5,566 dan memiliki skor minimum 36 dan maksimum 60. Berdasarkan tiga standar deviasi maka dapat dilihat bahwa Sistem Pengendalian Intern (X) berada diatas skor minimum namun dibawah skor maximum. Ini berarti data yang diperoleh dikatakan baik. Dan untuk variabel Akuntabilitas Keuangan (Y) memiliki rata-rata sebesar 52,08 dengan standar deviasi 5,677, dan memiliki skor minimum 41 dan maksimum 60. Dan ini juga dikatakan baik, karena berada pada standar deviasi yang benar berdasarkan standar deviasi karena berada diantara nilai maksimum dan minimum, yaitu berada dibawah skor maksimum, dan diatas skor minimum.

E. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika r hitung $>$ r tabel, maka data dikatakan valid, dimana r tabel untuk $n = 64$, adalah 0,2075. Berdasarkan hasil pengolahan dan didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* Untuk masing-masing item variabel x, semuanya diatas r tabel. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel x adalah valid.

Tabel 11
Nilai *Corrected Item-Total Correlation*
terkecil

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil
Akuntabilitas Keuangan (Y)	0,358
Sistem Pengendalian Intern (X)	0,182

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Dari tabel 11 di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Implementasi Akuntabilitas Keuangan diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil adalah 0,358. Untuk Instrumen Sistem Pengendalian Intern nilai terkecil adalah 0,182

Tabel 12
Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item	Faktor Loading	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern (X)	SPI 1	,524	Valid
	SPI 2	,509	Valid
	SPI 3	,622	Valid
	SPI 4	,643	Valid
	SPI 5	,691	Valid
	SPI 6	,824	Valid
	SPI 7	,818	Valid
	SPI 8	,687	Valid
	SPI 9	,691	Valid
	SPI 10	,665	Valid
	SPI 11	,756	Valid
	SPI 12	,818	Valid
Akuntabilitas Keuangan (Y)	AK 1	,609	Valid
	AK 2	,743	Valid
	AK 3	,731	Valid
	AK 4	,806	Valid
	AK 5	,778	Valid
	AK 6	,872	Valid
	AK 7	,763	Valid
	AK 8	,663	Valid
	AK 9	,651	Valid
	AK 10	,844	Valid
	AK 11	,813	Valid
	AK 12	,709	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa diperoleh semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai *factor loading* yang lebih besar dari 0,5 sehingga semua indikator tersebut adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,6-0,7 bisa diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik. Berikut ini merupakan tabel 12 nilai *Cronbach's alpha* masing-masing instrumen:

Tabel 13
Nilai *Cronbach's Alpha*

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>
Akuntabilitas Keuangan (Y)	0,913
Sistem Pengendalian Intern (X)	0,863

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen Akuntabilitas Keuangan 0,913. Untuk instrumen Sistem Pengendalian Intern 0,863. Data ini menunjukkan nilai yang berada di atas 0,80. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

F. Uji Asumsi Klasik

Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi sederhana. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS versi 15. Sebelum data diolah dengan regresi sederhana, maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji Asumsi klasik yang dilakukan terdiri atas:

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dari pengolahan SPSS dapat diketahui dengan melihat nilai signifikan dari hasil uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5 %. Jika signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil perhitungan nilai *Kolmogro-Smirnov Test* untuk model yang diperoleh dapat dilihat pada tabel yang dibawah ini:

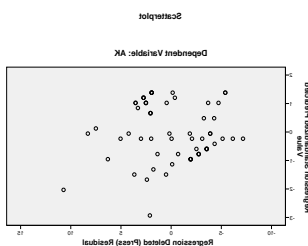
Tabel 14
Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	64
Kolmogorov-Smirnov Z	,949
Asymp. Sig. (2-tailed)	,329

Sumber: data primer yang diolah, 2013

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2001). Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED*, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah *residual* (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*standardiized* (Ghozali, 2001). Uji *heteroskedastisitas* menghasilkan grafik pola penyebaran titik (*scatterplot*) seperti tampak pada Gambar 2 berikut.



Sumber: data primer yang diolah, 2013

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

G. Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi

Analisis Regresi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program SPSS *for Windows* versi 15.0. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Koefisien Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients	T	Sig
	B		
(Constant)	10,790		
Sistem Pengendalian Intern (X)	,789	2,500	,015
		9,618	,000

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 16 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 10,790 + 0,789 X$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Keuangan

X = Sistem Pengendalian Intern

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 10,790 ini mengidentifikasi bahwa jika variabel independen yaitu Sistem Pengendalian

Intern adalah 0 maka Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar konstanta 10,790.

- b. Koefisien Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,789 mengidentifikasi setiap peningkatan system pengendalian intern satu satuan akan mengakibatkan peningkatan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,789 dengan asumsi variabel lain konstan.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2001). Nilai koefisien detrminasi dapat dilihat pada tabel 17 dibawah ini:

Tabel 16

Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,774(a)	,599	,592	3,625

Sumber: data primer yang diolah, 2013

3. Uji Hipotesis (t-test)

Uji *t statistic* (t-test) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Nilai t tabel adalah 0,05 dengan derajat bebas (db) = $n - k - 1 = 64 - 2 - 1 = 62$ adalah 1,670, berdasarkan hasil analisis pada tabel 16 maka dapat diketahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel atau nilai sig < 0,05. Nilai t tabel pada

0,05 adalah 1,670. Untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (X) nilai t hitung adalah 9,618 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung > t tabel yaitu $9,618 > 1,670$ atau nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Nilai koefisien dari variabel X bernilai positif yaitu 0,789. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (X) mempunyai hubungan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, sehingga hipotesis diterima.

5. Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan. Dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan yang ditunjukkan dari perbandingan bahwa t hitung > t tabel yaitu $9,618 > 1,670$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima yang artinya penelitian ini dapat menyediakan bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan. Artinya semakin tinggi sistem pengendalian intern, maka semakin tinggi pula akuntabilitas keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya (2004) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan antara pengendalian intern terhadap penerapan akuntabilitas.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh sistem peendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan pada pemerintah kota se provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Sistem Pengendalian Intern dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kota se provinsi Sumatera Barat.
2. Semakin baik Sistem Pengendalian Intern semakin baik pula akuntabilitas keuangan. Dengan sistem pengendalian intern yang berjalan dengan sangat baik akan mendorong meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern merupakan upaya yang dilakukan mencakup unsur-unsur pengendalian intern, untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dipercayanya informasi dan data, serta ditaatinya peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Dengan menerapkan pengendalian intern secara baik dan efektif pada suatu pemerintahan, maka akan meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini tidak digeneralisasi, dengan kata lain penelitian ini hanya berlaku di kota se Provinsi Sumatera Barat. Selain itu ada variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas informasi laporan keuangan

C. Saran

Penelitian ini mampu membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian

intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis data dan pembahasan, sistem pengendalian intern mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Namun, sistem pengendalian intern masih perlu ditingkatkan agar akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dapat lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Intern, masih ada beberapa item pertanyaan yang masih rendah.
2. Untuk mengoptimalkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya pemerintah daerah dapat lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertical, dan perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah serta melakukan pengawasan fungsional yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan
4. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan sampel yang lebih banyak lagi sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan akuntabilitas keuangan menjadi kuat.
5. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhinneka Cipta.
- Aribowo, Fajar. 2007. Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas. *Harian Bisnis Indonesia*. 19 November 2007.
- Collier, M, Paul. 1997. *The Power of Accounting: A Field Study of Local Financial Management in a Police Force*. Aston Business Scholl Reseach Institute.
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Cetakan I. Jakarta: PT Indeks.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Prgram SPSS. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gillespie, Cecil, 1985. *Accounting System, Procedures and Methods*. Prentice_Hall Inc. Englewood Cliffs.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, James A. 2004. *Accounting Information Systems*. South-Western, Thomson
- Herbert, Leo. Larry N. Killough, and Alan Walter. 1984. *Givermental Accounting and Control*, Cole Publishing Company.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mahsun, Mohammad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2004. Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara. *Media Akuntansi* 39/April/Tahun XI/2004, Hal 24.
- Mohamad, Ismail dkk. 2004. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Edisi Kedua. <http://www.lan.go.id>
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Salemba Empat.
- Noviyanti, Suzy & Intiyas Utami. 2004. Dasar-dasar Pengauditan. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Nurhayati, Isnaeni. 2004. Pengaruh penerapan SAI dan SAKIP terhadap kelayakan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. UNPAD, Tesis.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- _____. PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- _____. PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purdy, E, Derek. 1993. *Accounting, Controls, Change and The Perceptions of Managers: A Longitudinal Study of Words Units in A Teaching Hospital*.

Financial Accountability & Management, 9 (1), February.

- Shende, Suresh dan Tony Bennett. 2004. Concept Paper 2: *Transparancy and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA. <http://www.unpan.org>
- Surya, An-Nissa Sumunar. 2004. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Skripsi. Universitas Padjadjaran.
- Surakhmad, Winarno. 1989. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar. Bandung:Alumni
- Sugiyono, 2002, Statistika Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta.
- Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah. 2002. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Buku I.
- Warren, S. Carl. , and Reeve, M. James. , and Fess, E. Phillip. 2005. *Corporate Financial Accounting. South Western* : Thomson.
- Weygandt, J.J. , et al. (2005). *Accounting Principles*. New York: John Wiley & Sons
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Varibel Intervening. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Skripsi.

Tabel 2

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Butir Pertanyaan	Acuan
Sistem Pengendalian Intern	Kegiatan Pengendalian Sistem Akuntansi Pendapatan	- Penggunaan surat tanda setoran yang telah diotorisasi dan diperiksa oleh fungsi penerima untuk setiap penyetoran pendapatan pajak	Likert	A1	PP No 60 Tahun 2008
		- Pengecekan secara acak setiap SKPD atau SKRD yang masuk, apakah nilai yang tertera sama dengan nilai uang yang disetorkan.	Likert	A2	
		- Pengecekan apakah setiap pencatatan atas transaksi pendapatan telah dilandasi bukti pendukung yang lengkap.	Likert	A3	
		- Pengecekan secara independen terhadap posting transaksi-transaksi pendapatan kedalam catatan akuntansi.	Likert	A4	
	Kegiatan Pengendalian Sistem Akuntansi Belanja/Biaya	- Dalam transaksi belanja harus ada otorisasi umum dan khusus, terutama untuk setiap pembelian	Likert	A5	
		- Setiap surat pesanan pembelian harus didasarkan pada surat permintaan yang telah diotorisasi	Likert	A6	
		- Setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat pesanan pembelian yang telah diotorisasi	Likert	A7	
		- Bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sah.	Likert	A8	
		- Setiap pencatatan keregister buku kas keluar harus didukung dengan bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.	Likert	A9	
		- Pertanggungjawaban secara periodik semua formulir bernomor urut tercetak.	Likert	A10	
		- Panduan akun dan tinjauan terhadap pemberian kode akun	Likert	A11	
		- peninjauan kinerja secara periodik.	Likert	A12	

Kualitas Akuntabilitas Keuangan	Pertanggungja	- Pengungkapan sebab adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi	Likert	B1	Mardiasmo (2006)
	Waban	- Pengungkapan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.	Likert	B2	Mahsun (2006)
	Pengelolaan	- Pengungkapan sebab-sebab adanya perbedaan realisasi anggaran tahun sekarang dengan realisasi anggaran tahun lalu	Likert	B3	LAN dalam Akuntabilitas dan Good Governance (2001)
	Keuangan	- Penyampaian akuntabilitas kinerja keuangan tepat waktu	Likert	B4	SAP (2005)
	Penilaian kinerja keuangan	- Penilaian kinerja keuangan dari aspek kehematan penggunaan sumber dana	Likert	B5	
		- Penilaian kinerja keuangan dari aspek efisiensi penggunaan sumber dana	Likert	B6	
		- Penilaian kinerja keuangan dari aspek efektifitas penggunaan sumber dana	Likert	B7	
		- Penilaian atas pencapaian tujuan yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut dari tahun ke tahun	Likert	B8	
	Sistem informasi yang handal	- Data keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan material	Likert	B9	
		- Data keuangan yang disajikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Likert	B10	
		- Dalam penyajian data keuangan terdapat netralitas dalam pengungkapan.	Likert	B11	
	Akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen	- Adanya penilaian yang objektif dan independen terhadap akuntabilitas kinerja keuangan	Likert	B12	
		- Tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas	Likert	B13	

Tabel 8
Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Intern

Pernyataan	No. Item	N	Mean	TCR	Kategori
Menggunakan surat tanda setoran yang telah diotorisasi dan diperiksa oleh fungsi penerima untuk setiap penyetoran pendapatan pajak	1	64	4,52	90.4 %	Baik
Mengecek secara acak setiap SKPD atau SKRD yang masuk, apakah nilai yang tertera sama dengan nilai uang yang disetorkan	2	64	4,20	84 %	Baik
Mengecek apakah setiap pencatatan atas transaksi pendapatan telah dilandasi bukti pendukung yang lengkap	3	64	4,45	89 %	Baik
Mengecek secara independen terhadap posting transaksi-transaksi pendapatan kedalam catatan akuntansi	4	64	4,38	87,6 %	Baik
Mengotorisasi transaksi belanja, terutama untuk setiap pembelian	5	64	4,52	90,4%	Baik
Mandasarkan pada surat permintaan yang telah diotorisasi untuk setiap surat pesanan pembelian	6	64	4,34	86,8 %	Baik
Setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat pesanan pembelian yang telah diotorisasi.	7	64	4,27	85,4 %	Baik
Melampirkan dokumen pendukung yang lengkap dan sah untuk setiap bukti kas keluar	8	64	4,59	91,8 %	Baik
Menyertakan bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap untuk setiap pencatatan ke register buku kas keluar	9	64	4,48	89,6 %	Baik
Mempertanggungjawaban secara periodik semua formulir bernomor urut cetak	10	64	4,20	84 %	Baik
Melakukan peninjauan terhadap pemberian kode akun berdasarkan panduan akun.	11	64	4,23	84,6 %	Baik
Melakukan peninjauan kinerja secara periodic	12	64	4,13	82,6 %	Baik
MEAN			4,36	87,2 %	Baik

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Tabel 9
Distribusi Frekuensi Akuntabilitas Keuangan

Pernyataan	No. Item	N	Mean	TCR	Kategori
Mengungkap sebab-sebab adanya perbedaan antara anggaran dan realisasinya pendapatan pajak	1	64	4,08	81,6 %	Baik
Mengungkap adanya ketidak tercapaian target-target yang telah ditetapkan	2	64	4,17	83,4 %	Baik
Mengungkapkan sebab-sebab adanya perbedaan realisasi anggaran tahun sekarang dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun lalu	3	64	4,17	83,4 %	Baik
Mentampilkan pertanggungjawaban laoran realisasi anggaran secara tepat waktu	4	64	4,33	86,6 %	Baik
Mengungkapkan realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu dihubungkan dengan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut.	5	64	4,36	87,2 %	Baik
Mengungkap realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu dihubungkan dengan tingkat ketercapaian tujuan kegiatan tersebut	6	64	4,39	87,8 %	Baik
Mengungkap pencapaian tujuan yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut dari tahun ke tahun	7	64	4,14	82,8 %	Baik
Menyajikan data keuangan yang bebas dari kesalahan material	8	64	4,33	86,6 %	Baik
Menyajikan data keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	9	64	4,63	92,6 %	Baik
Netralitas dalam pengungkapan penyajian data keuangan	10	64	4,47	89,4 %	Baik
Menilai secara objektif dan indenpenden terhadap pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran keuangan	11	64	4,52	90,4 %	Baik
Menindaklanjuti laporan penilaian atas pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran.	12	64	4,50	90 %	Baik
MEAN			4,34	86,8 %	Baik

Sumber: data primer yang diolah, 2013